

ABSTRAK

Parid Alparizi, 1228040085, 2026, Analisis Relasi Kuasa antara BUMDes dan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa wisata Kertayasa Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika otonomi desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan luas namun cenderung menciptakan konsentrasi kekuasaan pada pemerintah desa. Di Desa Wisata Kertayasa, kemajuan ekonomi yang signifikan melalui sektor pariwisata menyisakan pertanyaan mengenai asimetri kekuasaan antara pemerintah desa dan BUMDes. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya indikasi dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan strategis dan penguasaan aset pariwisata, yang berpotensi menempatkan BUMDes hanya sebagai perpanjangan kepentingan politik pemerintah desa dibandingkan sebagai aktor ekonomi yang otonom.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk relasi kuasa yang terjalin antara BUMDes dan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kertayasa. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme kekuasaan yang dijalankan melalui proses pengambilan keputusan dan pembatasan agenda, serta memahami bagaimana proses pembentukan kesadaran dan kepentingan kedua aktor tersebut dikonstruksikan dalam pengelolaan pariwisata.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan Teori Tiga Dimensi Kekuasaan dari Steven Lukes sebagai pisau analisis utama. Dimensi pertama melihat kekuasaan dalam pengambilan keputusan formal yang tampak (*decision-making power*), dimensi kedua menganalisis kemampuan aktor dalam mengendalikan agenda dan membatasi isu tertentu (*non-decision making power*), dan dimensi ketiga membedah bagaimana kekuasaan bekerja secara laten melalui pembentukan kesadaran, nilai, dan persepsi sehingga relasi kuasa yang ada diterima sebagai sebuah kewajaran (*ideological power*).

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Desa, pengurus BUMDes, dan pelaku wisata lokal. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi seperti Peraturan Desa, RPJMDes, dan laporan keuangan BUMDes. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, triangulasi sumber dan metode, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa antara Pemerintah Desa dan BUMDes di Desa Kertayasa sudah kolaboratif namun tidak sepenuhnya setara, di mana pemerintah desa mendominasi kebijakan strategis dan kepemilikan aset, sementara BUMDes memiliki otoritas pada aspek operasional teknis. Kekuasaan dijalankan melalui kontrol agenda yang memprioritaskan isu pembangunan fisik dan ekonomi desa, namun membatasi pembahasan isu-isu sensitif terkait distribusi manfaat dan konflik internal. Secara ideologis, legitimasi pengelolaan wisata diperkuat melalui narasi “kepentingan bersama” yang membentuk kesadaran masyarakat untuk menerima sistem pengelolaan yang ada demi stabilitas dan kemajuan desa.

Kata Kunci: BUMDes, Desa Wisata Kertayasa, Relasi Kuasa